

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada periode tahun 2018-2023 yang didasarkan pada konsolidasi visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dengan berbagai isu strategis yang mengemuka di Papua, serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk masa 5 (lima) tahun mendatang

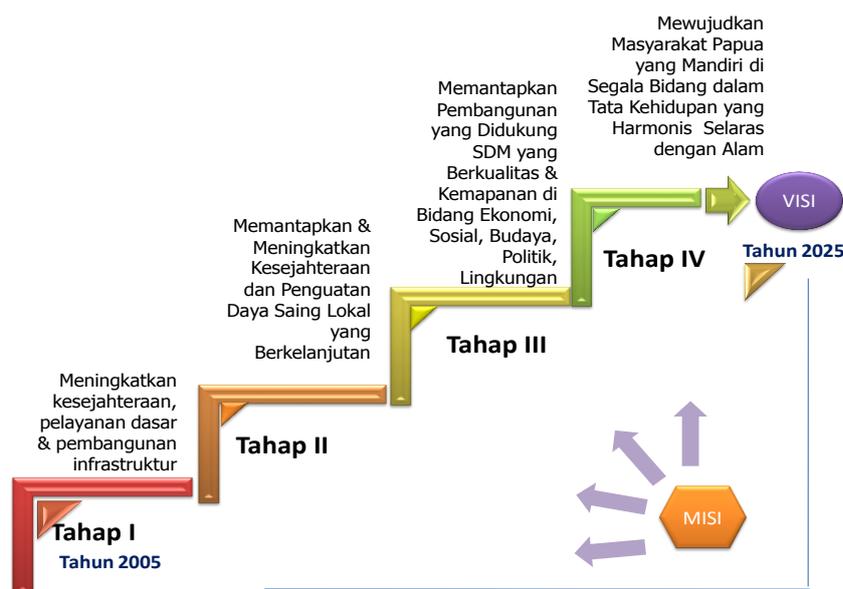
5.1. VISI JANGKA PANJANG PAPUA

Periode 2018-2023 merupakan tahap ke tiga dalam proses pencapaian Visi jangka panjang Provinsi Papua. Visi Pembangunan Daerah Jangka Panjang seperti yang telah dituangkan dalam dokumen Rancangan RPJPD Provinsi Papua tahun 2005-2025 adalah Terwujudnya **Papua yang Mandiri secara Sosial, Budaya, Ekonomi dan Politik**.

Dimana agenda atau tema tahap ke tiga pembangunan jangka panjang Provinsi Papua yang sesuai dengan periode RPJMD Provinsi Papua 2018-2023, ditujukan untuk Memantapkan Pembangunan yang didukung SDM yang Berkualitas dan Kemapanan di Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, Politik, Lingkungan.

Pelaksanaan pembangunan pada tahap ini dilakukan dengan terus meningkatkan kemandirian, kemitraan, dan keterlibatan orang asli Papua dalam segala bidang pembangunan yang berorientasi pada kemandirian dan kemapanan lokal berbasis keberlanjutan, ketahanan pangan, kemampuan daya saing berbasis keunggulan kompetitif, didukung tenaga kerja lokal yang handal, perlindungan perempuan dan anak, serta menekankan pada kesetaraan gender serta terwujudnya lembaga jaminan sosial. Kemapanan ini juga ditunjukkan dengan pelembagaan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal yang didukung oleh kepatuhan dan penegakan hukum, ketrentaman dan ketertiban serta budaya kerja yang professional.

Gambar 5.1. Agenda/Tema Pembangunan Jangka Panjang



Selanjutnya budaya demokrasi dan saling menghormati perbedaan dan pendapat dengan menitikberatkan kesatuan bangsa dalam koridor NKRI tetap sehat dan berkembang secara dinamis, namun tetap berbasis pada kearifan lokal, khususnya dalam pelaksanaan otonomi khusus yang memasuki tahun ke-20. Pelaksanaan otonomi khusus tetap berprinsip pada peningkatan kesejahteraan orang asli Papua yang dilandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memberikan manfaat social setinggi-tingginya; penguatan kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan; peningkatan kemampuan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan bencana alam; menghindari pertumbuhan ekonomi yang tidak terkendali dan berorientasi jangka pendek.

Sarana dan prasarana dasar yang telah ada terus dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya sehingga keamanan di bidang infrastruktur menjamin keberlanjutan kemandirian lokal, yang dituangkan dalam program yang berkesinambungan, melalui pendampingan dan penguatan kelembagaan sosial; keamanan di bidang kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, fasilitas pendidikan dan kesehatan dilengkapi akses pada sumber daya yang dibutuhkan dengan berbasis budaya lokal yang mampu mempertahankan kemandirian masyarakat Papua

berdasarkan perkembangan IPTEK yang mampu dipahami dan dikuasai untuk diterapkan sebagai sarana pendukung kemandirian lokal.

5.2. VISI PEMBANGUNAN PERIODE 2018-2023

Provinsi Papua memiliki modal dan asset yang sangat besar, baik Aset sumber daya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografis penduduk, sumber daya kultural yang beragam dan kuat. Kita mampu bangkit dan mandiri mengubah tantangan pembangunan menjadi peluang dan kesempatan. Kita juga mempunyai lahan yang luas dan subur yang bisa ditanami oleh berbagai komoditi pangan dan pertanian. Masyarakat Papua memiliki potensi tinggi di berbagai bidang, kesenian dan budaya, dan olah raga serta kreativitas.

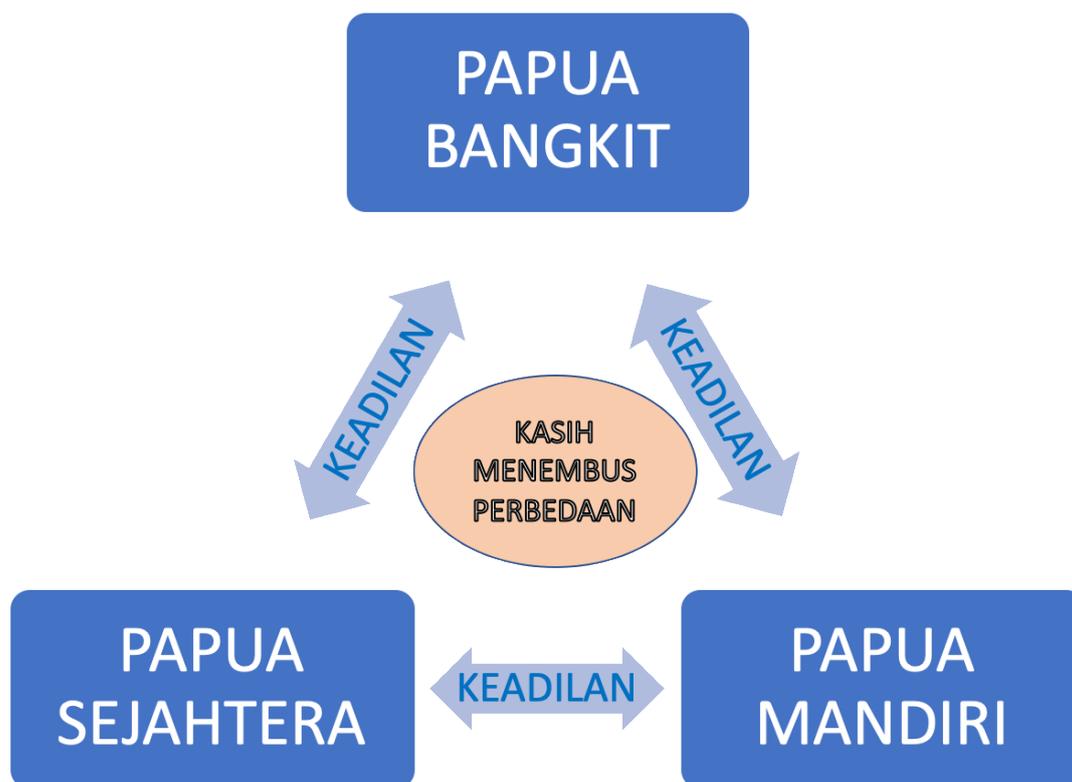
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan yang telah menuai beragam hasil pada periode 2013-2018, harus terus dipertahankan dan dikembangkan. Capaian dan prestasi pembangunan di tahun 2013-2018, pada hakekatnya adalah salah satu modal dasar ---*main capital*--- yang harus dilanjutkan untuk meraih capaian dan prestasi pembangunan yang lebih baik lagi, di lima tahun yang akan datang. Pada periode 2018-2023 akan terus dan konsisten berfokus pada meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua, membangun keadilan, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, menjaga kesatuan Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan uraian di atas dan mencermati tantangan jauh kedepan yang masih harus dihadapi, maka Visi Provinsi Papua tahun 2018-2023, adalah :

PAPUA BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA YANG BERKEADILAN

Jika memperhatikan pernyataan visi diatas pembangunan di atas, maka **Kebangkitan, Kemandirian** dan **Kesejahteraan** masyarakat Papua sebagai cita-cita bersama akan dapat terwujud secara hakiki jika dalam pelaksanaan pembangunan menjawab rasa **Keadilan** bagi seluruh masyarakat di Provinsi Papua. Korelasi antara Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan sebagai visi pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 5.2 Visi Papua 2018-2023



Dari gambar di atas tampak jelas bahwa Papua yang **BERKEADILAN** menjadi fokus utama bagi perwujudan **PAPUA BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA**, yang diselimuti dengan prinsip **Kasih Menembus Perbedaan**, karena dengan kasih yang akan menembus segala sekat-sekat perbedaan yang ada, inilah yang disebut **Papua Yang Baru Dalam Bingkai Peradaban Baru Papua**. Pelaksanaan pembangunan harus dengan pendekatan **KASIH**, menjadikan pembangunan yang dilaksanakan dapat menghilangkan perasaan masyarakat Papua terhadap bentuk *ketidakadilan, marginalisasi, ketimpangan dan diskriminasi*. Sehingga dengan pendekatan Kasih ini akan menghilangkan konflik dalam masyarakat dan pembangunan dapat terus terjaga dan terpelihara untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Penjelasan masing-masing elemen visi di atas adalah sebagai berikut:

PAPUA BANGKIT

Terwujudnya Masyarakat Papua yang berkemauan dan bertekad tinggi sebagai kesadaran kontemplatif kolektif untuk melepaskan diri dari label ketertinggalan dan kemiskinan untuk mencapai derajat kualitas hidup yang setinggi-tingginya,

sehingga mampu berdiri tegak dengan harkat dan martabat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa menghilangkan identitas diri dan kekhususan ke-Papua-an. Kebangkitan ini terjadi dilevel individu, keluarga, komunitas, maupun regional. Identitas diri orang Papua diakui dan dihormati dalam berbagai level dan bidang pembangunan. Dimana Orang Papua mampu mengaktualisasikan diri dan mengambil peran diberbagai bidang pembangunan. Papua Bangkit dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang semakin baik.

PAPUA MANDIRI

Terwujudnya kondisi Masyarakat Papua mampu mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan kemajuan ekonomi. Dengan didukung Generasi baru Papua yang memiliki jiwa kewirausahaan (*Entrepreneurship*) serta ekonomi kampung tumbuh dan berkembang. Perwujudan Papua Mandiri dilakukan dengan mendorong tumbuhnya berbagai sektor unggulan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan pariwisata harus dikembangkan sehingga memberi nilai tambah dalam pembangunan dan memastikan tersedianya lapangan kerja, serta didukung pengembangan industri pengolahan yang berbasis keunggulan potensi daerah dan industri ramah lingkungan. Papua Mandiri dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Papua pada sektor dan subsektor unggulan yang semakin baik.

PAPUA SEJAHTERA

Secara sederhana, sejahtera dipahami sebagai tidak kekurangan sesuatu apapun, perasaan aman sentosa, makmur dan selamat atau terlepas dari segala macam gangguan. Dengan pendekatan yang lain, sejahtera juga dapat dikaitkan dengan meningkatnya kualitas hidup masyarakat papua yang setinggi-tingginya dengan tercermin dari kenyamanan masyarakat papua dalam menjalani kehidupan atau menikmati hasil pembangunannya. Di sini, kesejahteraan dikaitkan konsep lahiriah, tapi juga menjangkau segi batiniah. Kesejahteraan juga bermakna

kemampuan sumber daya alam Papua yang kaya dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks makro, pembangunan daerah juga dimaknai sebagai upaya mencapai kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir bathin, yang memungkinkan bagi setiap Masyarakat Papua untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniyah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia.

PAPUA BERKEADILAN

Terwujudnya Keadilan adalah semua Masyarakat Papua tanpa terkecuali dapat memenuhi hak-hak dasarnya di bidang sosial, ekonomi dan budaya terutama pangan, sandang dan papan secara merata, serta memiliki rasa aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah sehingga menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju serta memiliki pilihan yang luas dalam seluruh kehidupannya. Sikap mental dan perilaku adil, menjunjung tinggi kesetaraan dan kebersamaan, didukung moral dan budaya gotong royong, saling menghormati dan menunjung tinggi nilai luhur kemanusiaan, mempertahankan eksistensi dan jati diri orang asli Papua sebagai kebanggaan sudah terbentuk dan tertanam di dalam setiap individu orang asli Papua. Pembangunan yang adil dan merata, dengan partisipasi aktif adat dan agama serta seluruh komponen masyarakat, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh Masyarakat khususnya Orang Asli Papua.

5.3. MISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018-2023

Misi pembangunan 2018-2023 merupakan rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi, namun tidak dapat terlepas dari kondisi dan tantangan lingkungan global dan domestik pada kurun waktu 2018-2023 yang mempengaruhinya. Misi ini juga diarahkan untuk mewujudkan visi Jangka Panjang Daerah yakni Papua Mandiri Secara Sosial, Budaya, Ekonomi dan Politik. Usaha-usaha Perwujudan visi akan dijabarkan dalam misi, sebagai berikut:

Penjelasan masing-masing misi :

1. Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM
2. Memantapkan Rasa Aman, Tenram dan Damai serta Kehidupan Demokrasi memperkuat Bingkai NKRI
3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
4. Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural secara Berkelanjutan
5. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan

Misi Pertama, Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM

Memantapkan kualitas dan daya saing SDM Papua dilakukan untuk mendukung dan mewujudkan kebangkitan dan kemandirian. Orang Papua yang mandiri memiliki kemauan, kreatif dan inovatif sebagai pelaku pembangunan bagi kemajuan daerah untuk mencapai kualitas hidup manusia serta memungkinkan setiap orang dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kualitas manusia yang bermutu tinggi ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia yang dimodifikasi sesuai dengan kondisi lokal Papua dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Program pembangunan dalam peningkatan kualitas dan daya SDM tahun 2013-2018 telah meletakkan pondasi dalam memantapkan kualitas dan daya Saing SDM. Hal ini dari hasil yang telah dicapai seperti peningkatan angka partisipasi pendidikan, peningkatan angka melek huruf, penurunan angka kematian ibu, pengiriman siswa-siwa berprestasi Asli Papua melanjutkan sekolah di dalam dan luar

negeri serta tercapainya target peningkatan IPM tahun 2018. Fondasi peningkatan kualitas dan daya saing SDM juga dapat dilihat dari kebijakan dan program-program yang sudah berjalan baik.

Untuk pelaksanaan pembangunan Tahun 2018-2023 mendatang, tetap konsisten melanjutkan berbagai program peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM Papua yang sudah berjalan dengan memberikan penekanan lebih lanjut dalam membuat kebijakan yang lebih efektif dan terarah dalam bentuk pengarusutamaan anggaran, kebijakan serta pengawasan dan pengendalian program terutama pada program beasiswa dalam dan luar negeri bagi anak Asli Papua. Misi memantapkan kualitas dan daya saing SDM Papua akan menjadi prioritas utama dalam pembangunan periode 2018-2023, yang berfokus pada bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi. SDM yang berdaya saing juga akan tercapai jika SDM Papua terjaga pasokan pangannya terjamin dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Untuk itu kemandirian pangan dan gizi merupakan prioritas dalam pembangunan Papua.

Misi Kedua, Memantapkan Rasa Aman, Tentram dan Damai serta Kehidupan Demokrasi memperkuat Bingkai NKRI

Terjaminnya ketentraman dan ketertiban akan menciptakan rasa aman bagi masyarakat, merupakan jaminan bagi terlaksananya pembangunan. Pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya telah dapat dirasakan rasa aman, tentram dan damai, walaupun masih ada peristiwa-peristiwa yang mengganggu rasa aman dan tentram masyarakat. Oleh karena itu pembangunan akan diarahkan untuk memperkuat kerukunan hidup umat beragama, selama ini kita telah meningkatkan rasa saling menghargai, rasa percaya dan harmonisasi antar kelompok sehingga tercipta kehidupan toleransi dan tenggang rasa di masyarakat. Disamping itu dengan keberagaman etnik yang ada di masyarakat, pembangunan budaya diarahkan untuk menghargai nilai budaya masing-masing etnik sebagai suatu nilai keunggulan Provinsi Papua dengan menanamkan prinsip kasih menembus perbedaan. Pemantapan sistem kerukunan hidup juga harus disertai dengan penerapan dan penegakan hukum dan HAM dilaksanakan secara tegas dan profesional dengan tetap

berdasarkan pada penghormatan HAM serta peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi.

Masyarakat yang demokratis merupakan landasan penting untuk tercapainya masyarakat yang mandiri. Untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis dilakukan dengan menguatkan kelembagaan sosial dan politik; memperkuat peran masyarakat; melaksanakan tata pemerintahan yang terdesentralisasi pada tingkat distrik dan kampung; meningkatkan partisipasi dan transparansi; mendorong peningkatan peran media massa dan pers dalam pembangunan.

Misi Ketiga, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan tata kelola pemerintahan merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatnya daya saing suatu daerah. Wujud dari penguatan tata kelola adalah meningkatnya transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas serta meningkatnya pelayanan kepada publik..

Disiplin ASN meningkat secara signifikan dan Pemerintah Provinsi Papua telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK atas Laporan Keuangan Daerah. Hal ini memberikan indikasi bahwa upaya keras dalam memperbaiki tatakelola pemerintahan selama lima tahun terakhir, telah berada dalam arah yang benar. Meskipun demikian capaian selama periode sebelumnya masih perlu ditingkatkan dan dimantapkan. Harus ada upaya yang lebih keras dan sistematis untuk memperbaiki praktik tatakelola pemerintahan ini.

Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan berkelanjutan. Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik upaya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Pada periode 2013-2018 telah dilakukan Reformasi Birokrasi, dilakukan dengan langkah-langkah peningkatan disiplin bagi ASN, peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan penerapan e-Government Provinsi Papua pada perencanaan dan penganggaran daerah, pendapatan daerah, investasi daerah, serta penerapan system Tunjangan Kinerja Daerah. Kesemuanya itu, diharapkan dapat membuahkan hasil yang positif khususnya dalam perbaikan pelayanan publik dan penanggulangan

korupsi.

Oleh karena itu langkah-langkah yang telah dilakukan akan dimantapkan dan diperkuat, demikian pula perubahan mind-set, culture-set dan pengembangan budaya kerja akan dilakukan secara lebih cepat dan terarah. Demikian juga upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantas korupsi secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance), pemerintah yang bersih (clean government) dan bebas KKN harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh, dan akan dipimpin langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur. reformasi birokrasi ini juga akan memperkuat hubungan kelembagaan yang harmonis antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan kampung, untuk memastikan implementasi Otonomi Khusus Papua dengan baik, termasuk melalui pembiayaan bersama dan transfer anggaran yang mendukung pemerataan dan keadilan.

Misi Keempat, Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah berbasis Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural secara Berkelanjutan

Periode pembangunan 2013-2018, telah berhasil membangun struktur perekonomian yang kokoh dan berkelanjutan di seluruh wilayah Papua berbasis ekonomi lokal, hasilnya dapat dilihat dari terwujudnya iklim investasi yang kondusif, tercapainya stabilitas makro ekonomi, terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari yang mendukung peningkatan perekonomian masyarakat khususnya di kampung-kampung.

Periode 2018-2023, penguatan dan percepatan perekonomian Provinsi Papua akan tetap melanjutkan pengembangan ekonomi daerah untuk memperkuat ekonomi daerah yang berbasis potensi masing-masing wilayah dan kampung. Dengan menitikberatkan pada hubungan antar wilayah/kampung didorong dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar wilayah/daerah yang kokoh serta berkesinambungan.

Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan perwilayahan berdasarkan karakteristik/kondisi wilayah dan potensi masing-masing wilayah serta

peningkatan produktivitas sumber daya ekonomi secara berkelanjutan, meningkatkan mutu produk dan menciptakan nilai tambah.

Penguatan dan percepatan perekonomian daerah dalam memanfaatkan sumber daya alam, harus tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada orang asli Papua untuk memperoleh akses legal melalui skema-skema perhutanan sosial dan hutan adat. Pemberdayaan orang asli Papua diprioritaskan untuk: menjamin akses bagi masyarakat memperoleh sumber daya ekonomi; memperkuat kemampuan dan kelembagaan masyarakat kampung untuk mengelola sistem produksi, konsumsi dan infrastruktur secara mandiri; dan Pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan berkelanjutan.

Pengembangan wilayah tetap dilakukan berbasis kultural yaitu wilayah La Pago, Mee Pago, Mamta, Saereri dan Animha, yang akan difokuskan pada pembangunan berbasis kampung dengan prinsip kesetaraan pemenuhan kebutuhan hidup dan pencapaian kualitas hidup di seluruh wilayah Papua, sehingga mewujudkan pelayanan pemerintahan yang lebih mampu mendorong percepatan kemandirian masyarakat asli Papua.

Untuk mendukung perekonomian dan pengembangan wilayah secara merata, akan didukung oleh peningkatan dan percepatan konektivitas antar wilayah dan Pemenuhan sarana dan prasarana dasar di wilayah distrik dan kampung diarahkan pembangunan jaringan transportasi antar kampung, pengembangan tenaga listrik terbarukan dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi bagi masyarakat asli Papua. Peningkatan dan percepatan konektivitas antar wilayah dan Pemenuhan sarana dan prasarana dasar akan diprioritaskan dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2018-2023.

Misi Kelima, Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Tertentu

Pembangunan yang merata dan berkeadilan akan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Papua tahun 2018-2023 mengingat pelaksanaan pembangunan di masa lalu, belum mampu mewujudkan pemerataan dan keadilan yang menjadi harapan seluruh Masyarakat. Penyebabnya antara lain,

proses pembangunan yang tidak adil sedemikian intensif pada masa lalu sehingga dampaknya tidak dapat diselesaikan atau diperbaiki dalam satu periode pelaksanaan pembangunan.

Perwujudan pembangunan yang merata dan berkeadilan akan diwujudkan dalam berbagai bidang. Dalam bidang ekonomi, pemerataan dan keadilan dapat diwujudkan dalam bentuk perbaikan distribusi pendapatan, perbaikan pemerataan pendapatan antar daerah, perbaikan kesenjangan antara kampung, terjadinya proses afirmasi bagi orang asli Papua. Dalam bidang sosial, pemerataan dan keadilan berupa perbaikan akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebebasan berpolitik, serta pemerataan antara laki-laki dan perempuan. Upaya pemerataan dan keadilan dalam periode 2018-2023 dilakukan dengan berbagai kebijakan. Untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan, bantuan untuk program pendidikan melalui beasiswa, kesehatan melalui Kartu Papua Sehat dan Gerbangmas pada periode 2013-2018 adalah bukti nyata dari upaya tersebut.

Dalam lima tahun ke depan, penguatan pemerataan dan keadilan akan dilakukan untuk setiap kebijakan dan kegiatan. Langkah ini diharapkan dalam jangka pendek akan memberikan penghasilan tambahan bagi keluarga tersebut (memperbaiki distribusi pendapatan) dan dalam jangka panjang akan dihasilkan generasi baru yang lebih baik tingkat pendidikan dan kesehatannya. Pemerintah Daerah akan memperkuat pengawasan dan pengendalian dari semua program agar benar-benar menysasar orang Asli Papua khususnya yang berada di kampung-kampung. Selanjutnya pengurangan kemiskinan akan diprioritaskan bantuan langsung (*cash transfer*) kepada seluruh penduduk anak usia 4 tahun ke bawah dan usia 60 tahun keatas melalui Program Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera (BANGGA PAPUA) dan perlindungan sosial melalui bantuan langsung dan program pembedayaan KAT dan bantuan sosial PMKS. Untuk memperkuat perekonomian di level wilayah akan menerapkan trilogi pengembangan ekonomi Papua, yaitu : 1) perubahan pola pikir masyarakat; 2) pengwilayahan komoditas unggulan daerah; 3) penerapan prinsip tanam, petik, olah dan jual.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, ditetapkan kriteria dan indikator-indikator makro pembangunan sebagai perwujudan pencapaian visi dan

misi Provinsi Papua tahun 2018-2023. Penjabaran indikator makro keberhasilan untuk mewujudkan visi dan misi adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1. Indikator Makro Pembangunan Tahun 2013-2018

No	Indikator	Satuan	Kondisi 2017	Target 2023	Target RPJPD
1	IPM	Indeks	59,09	65	70
2	Persentase Penduduk Miskin	%	27,76	20	< 19
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,64	5 – 6,5	6,21
4	PDRB Perkapita (TP)	Juta Rp	37,51	50	> 40
5	Gini Rasio	%	0,400	0,3845	-
6	Pengangguran Terbuka	%	3,62	2,00	1,9
7	Konektivitas Wilayah (akses reguler ke ibukota Kab/kota)	%	64,29	100	-
8	Intensitas Emisi GRK	Ton CO2/Juta Rupiah	0,392	0,282	-

5.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah dan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* dan *impact* program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Misi ke-1 : Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM

Misi ke-1 mempunyai 1 tujuan dan 7 sasaran, yaitu :

- ✓ T1. Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing, dengan sasaran :
 - S1. Meningkatnya Aksesibilitas, Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan
 - S2. Meningkatkan Budaya Baca pada Masyarakat
 - S3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
 - S4. Sukses penyelenggaraan PON dan prestasi olahraga
 - S5. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah
 - S6. Meningkatkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan
 - S7. Terwujudnya internalisasi nilai adat dan budaya asli Tanah Papua dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat

Misi ke-2 : Memantapkan Rasa Aman, Tentram dan Damai serta Kehidupan Demokrasi memperkuat Bingkai NKRI

Misi ke-2 mempunyai 1 tujuan dan 4 sasaran, yaitu :

- ✓ T2. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban yang berbasis pada kohesivitas sosial dan harmonisasi keberagaman potensi kehidupan masyarakat Papua, dengan sasaran :
 - S8. Meningkatnya suasana tertib, aman dan kepastian hukum
 - S9. Meningkatnya Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat
 - S10. Meningkatnya penegakan HAM
 - S11. Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi

Misi ke-3 : Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

Misi ke-3 mempunyai 1 tujuan dan 4 sasaran, yaitu :

- ✓ T3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan sasaran :
 - S12. Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua
 - S13. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
 - S14. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah
 - S15. Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah

Misi ke-4 : Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural dan Berkelanjutan

Misi ke-4 mempunyai 2 tujuan dan 14 sasaran, yaitu :

- ✓ T4. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan, dengan sasaran :
 - S16 Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
 - S17 Mengoptimalkan peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan
 - S18 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim
 - S19 Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan
 - S20 Membangun struktur perekonomian yang kokoh berbasis pada penciptaan nilai tambah yang optimal dan berkelanjutan
 - S21 Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan

- S22 Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
- S23 Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah
- ✓ T5. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Daerah Guna Menopang Pengembangan Wilayah Serta Akses Pada Layanan Dasar Dan Pasar, dengan sasaran :
 - S24. Peningkatan akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah
 - S25. Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten
 - S26. Meningkatnya Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah
 - S27. Meningkatnya Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman
 - S28. Meningkatnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan
 - S29. Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah

Misi ke-5 : Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Tertentu

Misi ke-5 mempunyai 1 tujuan dan 6 sasaran, yaitu :

- ✓ T6. Meningkatkan pemerataan pembangunan, dengan sasaran :
 - S30 Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung
 - S31 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP
 - S32 Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan
 - S33 Meningkatnya pemberdayaan terhadap KAT dan bantuan sosial PMKS

- S34 Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
- S35 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan anak

Tabel 5.2. Matriks Keselarasan Misi, Tujuan Sasaran Serta Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Papua Tahun 2018-2023

No	MISI/TUJUAN/SASARAN	Indikator Tujuan		Kondisi Kinerja Awal Perencanaan		Target Kinerja					Kondisi Akhir Perencanaan
		Deskripsi	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
M1	Misi Pertama, Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM										
T1	Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai Indeks	59,09	60,11	61,15	62,20	63,27	64,36	65,47	65,47
		Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai Indeks	48,83	50,54	52,30	54,13	56,02	57,97	60,00	60,00
		Indeks Pembangunan Olah Raga	Tingkatan Status	n/a	n/a	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
		Persentase potensi budaya lokal yang dilestarikan	persen	n/a	n/a	40	45	50	55	60	60
		Indeks Ketahanan Pangan	Nilai Indeks	n/a	37,09	39,53	42,13	44,90	47,85	51,00	51,00
S1	Meningkatnya Aksesibilitas, Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6,3	6,6	6,9	7,2	7,5	7,8	8,2	8,21
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	10,5	10,8	11,0	11,2	11,5	11,7	12,0	12,00
		Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf	Persen	73,89	74,9	75,9	76,9	77,9	78,9	80,0	80,00
		Kemampuan membaca, menulis, dan berhitung untuk kelas 2 dan 3	Persen	40,00	42,8	45,8	49,0	52,4	56,1	60,0	60,00
S2	Meningkatnya budaya baca pada masyarakat	Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah	orang per hari	n/a	n/a	150	150	200	250	300	300
S3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	65,14	65,86	66,59	67,33	68,07	68,83	69,59	69,59

No	MISI/TUJUAN/SASARAN	Indikator Tujuan		Kondisi Kinerja Awal Perencanaan		Target Kinerja					Kondisi Akhir Perencanaan
		Deskripsi	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
S4	Sukses pelaksanaan PON dan prestasi olahraga	Perolehan medali emas dalam PON	medali	17	-	-	90	-	-	-	90
		Jumlah atlet yang berprestasi pada event olah raga nasional	Atlet	30	30	40	80	85	95	100	100
		Ketepatanwaktuan pelaksanaan PON				tepat waktu					
S5	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	Persentase organisasi pemuda yang aktif	persen	68,08	69,19	70,3	71,5	72,6	73,8	75,0	75,00
		Persentase pemuda Asli Papua yang menjadi wirausahawan	persen	15,60	16,6	17,7	18,8	20,1	21,4	22,8	22,76
S6	Meningkatkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan	Cakupan daerah rawan pangan	jumlah kabupaten/kota	13	13	11	10	9	7	7	7
		Persentase kenaikan cadangan pangan	persen	26,95	27,44	27,93	28,43	28,95	29,47	30,00	30
		Persentase penduduk tahan pangan	persen	40,04	42,83	45,82	49,01	52,43	56,09	60,00	60
S7	Terwujudnya internalisasi nilai adat dan budaya asli Tanah Papua dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat	Cakupan budaya tak benda yang ditetapkan	jumlah	3	3	1	1	1	1	1	5
		Cakupan Cagar budaya yang ditetapkan	jumlah	0	0	0	0	1	0	1	2
		Cakupan kurikulum muatan lokal	persen	n/a	n/a	2	2	2,5	2,5	5	5
M2	Misi Kedua, Memantapkan Rasa Aman, Tenang dan Damai serta Kehidupan Demokrasi memperkuat Bingkai NKRI										
T2	Tujuan 2 Meningkatkan	Angka Kriminalitas	per 100.000	236,00	218,00	202,00	187,00	173,00	159,00	147,00	147,00

No	MISI/TUJUAN/SASARAN	Indikator Tujuan		Kondisi Kinerja Awal Perencanaan		Target Kinerja					Kondisi Akhir Perencanaan
		Deskripsi	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	keamanan, ketentraman dan ketertiban yang berbasis pada kohesivitas sosial dan harmonisasi keberagaman potensi kehidupan masyarakat Papua		penduduk								
		Indeks Demokrasi	Nilai Indeks	61,02	61,36	61,70	62,04	62,39	62,73	63,08	63,08
S8	Meningkatnya suasana tertib, aman dan kepastian hukum	Rasio kriminalitas yang ditangani	persen	63,62	64,64	65,68	66,73	67,81	68,89	70,00	70,00
S9	Meningkatnya Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	indeks	75,97	76,42	76,86	77,31	77,77	78,22	78,68	78,68
S10	Meningkatnya penegakan HAM	Cakupan kabupaten/kota yang melaksanakan RANHAM (Rencana Aksi Nasional HAM)	Jumlah	3	3	3	3	3	3	3	15
		Rata-rata Nilai Skor Peduli HAM	nilai	0	0	50	60	65	70	75	75
S11	Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi	Nilai skor aspek kebebasan sipil	skor	92,15	92,62	93,09	93,56	94,04	94,52	95,00	95
		Nilai skor aspek hak-hak politik	skor	41,13	42,49	43,90	45,35	46,85	48,40	50,00	50
		Nilai skor aspek lembaga demokrasi	skor	53,45	54,49	55,55	56,63	57,73	58,86	60,00	60,00
M3	Misi Ketiga, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan										
T3	Tujuan 3 Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dalam penyelenggaraan	Indeks Pelayanan Publik	Nilai indeks	C-	C-	C-	C	C	B-	B	B
		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai indeks	C	C	C	CC	CC	B	B	B
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai indeks	C	C	C	B	B	B	A	A

No	MISI/TUJUAN/SASARAN	Indikator Tujuan		Kondisi Kinerja Awal Perencanaan		Target Kinerja					Kondisi Akhir Perencanaan
		Deskripsi	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	pemerintahan daerah										
S12	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua	Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang direncanakan	persen	85	88	90	93	95	98	100	100
		Cakupan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan hasil pengelolaan dana Otsus	jumlah kabupaten/kota	0	0	5	5	6	6	7	29
S13	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Presentase OPD dengan nilai SAKIP B	predikat	B	B	B	B	BB	BB	BB	BB
		Predikat yang diperoleh oleh LPPD Provinsi Papua	Indeks	4,88	5,08	5,29	5,50	5,72	5,96	6,20	6,20
		Cakupan database kependudukan skala provinsi (usia +17 tahun memiliki NIK)	persen	74,37	76,04	77,76	79,51	81,30	83,13	85,00	85,00
		Capaian Implementasi e-government terintegrasi (masuk e-planning dll ke program)	persen	80	80	85	85	90	90	95	95
		Cakupan inovasi pelayanan publik yang masuk dalam List Outstanding (terpuji)	persen	0	0	1	1	1	1	1	1
S14	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran,	Tingkat konsistensi RKPD terhadap RPJMD	persen	46,39	80,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00

No	MISI/TUJUAN/SASARAN	Indikator Tujuan		Kondisi Kinerja Awal Perencanaan		Target Kinerja					Kondisi Akhir Perencanaan
		Deskripsi	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah	Persentase indikator kinerja sasaran daerah dalam RPJMD yang mencapai target	persen	-	75,38	30,00	40,00	50,00	70,00	85,00	85,00
		Rasio belanja langsung dalam komposisi APBD	persen	48,24	36,70	39,04	41,53	44,18	47,00	50,00	50,00
		Cakupan ketersediaan data statistik bagi pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	persen	-	50,00	53,48	57,20	61,19	65,44	70,00	70,00
S15	Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Opini BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Papua	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Ketepatan waktu Penetapan APBD	Kategori	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu
		Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	persen	7,81	8,61	9,49	10,46	11,52	12,70	14,00	14,00
M4	Misi Keempat, Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural dan Berkelanjutan										
T4	Tujuan 4: Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi DT	persen	4,64	4,96	5,24	5,56	5,91	6,26	6,62	6,62
		Laju Pertumbuhan Ekonomi TT	persen	5,18	5,52	5,83	6,20	6,53	6,95	7,39	7,39
		Rasio Gini	nilai indeks	0,4000	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39	0,38	0,3840
		Tingkat Emisi Karbon	Ton CO2	0,392	0,371	0,351	0,332	0,315	0,298	0,282	0,282
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	nilai indeks	81,47	82,06	82,64	83,21	83,83	84,44	85,03	85,03

No	MISI/TUJUAN/SASARAN	Indikator Tujuan		Kondisi Kinerja Awal Perencanaan		Target Kinerja					Kondisi Akhir Perencanaan
		Deskripsi	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		Persentase penerapan green economy	persen			50	55	60	65	70	70
		Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	3,62	2,91	2,70	2,50	2,32	2,16	2,00	2,00
		PDRB Perkapita DT	juta rupiah	58,68	59,13	59,58	59,86	60,13	60,58	60,94	60,94
		PDRB Perkapita TT	juta rupiah	37,52	39,82	42,19	44,77	47,50	50,50	53,43	53,43
		Tingkat Inflasi	persen	2,41	2,41	2,36	2,36	2,34	2,30	2,26	2,26
S16	Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	87,6	88,00	88,39	88,79	89,19	89,60	90,00	90
		Cakupan penanganan daerah rawan pangan	persen	-	-	45	50	55	60	65	70
		Kontribusi Sektor tanaman pangan Terhadap PDRB	persen	2,27	2,59	2,95	3,37	3,84	4,38	5,00	5,0
		Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	persen	0,80	1,09	1,47	2,00	2,71	3,68	5,00	5,0
		Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB	persen	0,82	1,11	1,50	2,02	2,74	3,70	5,00	5,00
S17	Mengoptimalkan peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan	Rata-rata pendapatan perkapita di wilayah kabupaten sekitar daerah pertambangan	Rp. juta	13,21	14,69	16,34	18,17	20,21	22,48	25,00	25,00
S18	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim	Indeks Kualitas Udara	indeks	90,91	91,58	92,25	92,93	93,62	94,31	95,00	95
		Indeks Kualitas Air	indeks	77,33	77,77	78,21	78,65	79,10	79,55	80,00	80
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	indeks	78,18	79,28	80,39	81,52	82,66	83,82	85,00	85

No	MISI/TUJUAN/SASARAN	Indikator Tujuan		Kondisi Kinerja Awal Perencanaan		Target Kinerja					Kondisi Akhir Perencanaan
		Deskripsi	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		Intensitas penurunan emisi	Ton CO2/rupiah	-	-	31.580,25	39.475,31	47.370,37	55.265,43	63.160,49	63.160,49
S19	Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan	rasio	23,93	24,85	25,80	26,79	27,82	28,89	30,00	30
		Pertumbuhan PDRB sub-sektor kehutanan	persen	1,29	1,48	1,71	1,97	2,26	2,61	3,00	3
		Laju Deforestasi	ribu hektar	48,6	43,50	38,94	34,86	31,20	27,93	25,00	25
S20	Membangun struktur perekonomian yang kokoh berbasis pada penciptaan nilai tambah yang optimal dan berkelanjutan	Kontribusi sektor perdagangan Terhadap PDRB	persen	8,00	8,30	8,62	8,94	9,28	9,63	10,00	10
		Kontribusi sektor Industri Terhadap PDRB	persen	1,94	2,19	2,47	2,79	3,14	3,55	4,00	4
		Jumlah kawasan industri rakyat yang dikembangkan	Jumlah	0	0	1	1	2	2	4	10
		Persentase koperasi aktif dan berkembang	persen	52	53,66	54,88	56,11	57,38	58,68	60,00	60
		Jumlah UMKM yang berkembang	Jumlah	3428	3517	3609	3703	3799	3898	4000	4000
		Jumlah Kunjungan Wisatawan	ribu orang	900,57	980,50	1067,52	1162,26	1265,42	1377,72	1500,00	1500
		Lama Tinggal Wisatawan	Hari	2	2,20	2,41	2,65	2,90	3,19	3,50	3,5
S21	Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan	Kontribusi sub Sektor perikanan Terhadap PDRB	persen	4,53	5,33	6,27	7,37	8,67	10,20	12,00	12
		NTP perikanan tangkap	Skor	103,75	103,96	104,17	104,37	104,58	104,79	105,00	105
		NTP perikanan budidaya	Skor	83,27	85,85	88,51	91,25	94,08	96,99	100,00	100
		Tingkat konsumsi ikan per kapita	kg/kapita/bulan	0,22	0,33	0,49	0,74	1,10	1,65	2,46	2,46

No	MISI/TUJUAN/SASARAN	Indikator Tujuan		Kondisi Kinerja Awal Perencanaan		Target Kinerja					Kondisi Akhir Perencanaan
		Deskripsi	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
S22	Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	76,94	77,44	77,95	78,46	78,97	79,48	80,00	80,00
		Tingkat Kesempatan Kerja	persen	96,01	97,09	97,34	97,59	97,84	98,09	98,34	98,34
S23	Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah	Jumlah nilai investasi PMDN yang direalisasikan	Rp. juta	52.510.304	54.401.000	56.360.000	58.389.000	60.491.000	62.669.000	64.926.000	64.926.365
		Jumlah nilai investasi PMA yang direalisasikan	Rp.juta	70.038.818	73.744.000	77.645.000	81.753.000	86.078.000	90.632.000	95.427.000	95.425.872
		Lama hari pengurusan ijin investasi	hari	90	90	80	60	40	30	20	20
T5	mewujudkan percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah guna menopang pengembangan wilayah serta akses pada layanan dasar dan pasar	Indeks Kemahalan Konstruksi	persen	229,82	224,56	219,42	214,39	209,48	204,69	200,00	200,00
		Kepuasan Pelayanan Informasi & Komunikasi	Kategori			C	C	C	B	B	B
S24	Peningkatan akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah	Persentase aksesibilitas antar wilayah kabupaten/kota yang terhubung sarana transportasi jalan	persen	55,17	55,17	58,62	65,52	72,41	79,31	93,10	93,10
		Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	persen	30	30	32	40	45	50	55	55
		Persentase jembatan provinsi dengan beton	persen	20	20	25	30	35	40	45	45

No	MISI/TUJUAN/SASARAN	Indikator Tujuan		Kondisi Kinerja Awal Perencanaan		Target Kinerja					Kondisi Akhir Perencanaan
		Deskripsi	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		dalam kondisi baik									
S25	Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten	Persentase kesesuaian Pemanfaatan ruang	persen			30	35	40	45	50	50
S26	Meningkatnya Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah	Persentase pemanfaatan sumberdaya air	persen			60	65	70	75	80	80
		Persentase pengendalian daya rusak air	persen			40	45	50	55	60	60
S27	Meningkatnya Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman	Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik	persen	33,06	34,12	35,22	36,36	37,54	38,75	40,00	40
		Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	persen	38,47	39,52	40,61	41,72	42,87	44,04	45,25	45,25
		Backlog perumahan layak huni	ribu ruta	147,88	138,55	129,80	121,61	113,93	106,74	100,00	100,00
S28	Meningkatnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan	Jumlah pembangkit listrik yang menggunakan energi baru terbarukan	unit	40,57	41,28	41,99	42,73	43,47	44,23	45,00	45
S29	Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah	Cakupan layanan telekomunikasi	persen			40	45	50	55	60	60
		Proporsi rumah tangga dengan akses internet	persen			5	7,25	7,5	8	10	10
M5	Misi Kelima, Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Tertentu										
T6	Meningkatkan pemerataan pembangunan	Cakupan Kampung Kontekstual Papua yang termasuk dalam status kampung berkembang	persen	5,37	6,94	8,97	11,59	14,97	19,35	25,00	25,00

No	MISI/TUJUAN/SASARAN	Indikator Tujuan		Kondisi Kinerja Awal Perencanaan		Target Kinerja					Kondisi Akhir Perencanaan
		Deskripsi	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		Tingkat Kemiskinan Wilayah Mee Pago	persen	32,32	31,78	31,25	30,71	30,23	29,72	29,23	29,23
		Tingkat Kemiskinan Wilayah Saireri	persen	30,12	29,80	29,47	29,15	28,81	28,48	28,16	28,16
		Tingkat Kemiskinan Wilayah La Pago	persen	36,30	35,89	35,48	35,04	34,60	34,20	33,80	33,80
		Indeks Williamson Antarwilayah Adat	indeks	0,8316	0,7774	0,7544	0,6907	0,6255	0,6067	0,5640	0,5640
		IPM wilayah perbatasan	indeks	63,25	64,02	64,79	65,58	66,38	67,18	68,00	68,00
		Tingkat Kerentanan Sosial	kategori	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah
		Indeks Ketimpangan Gender	indeks	0,517	0,508	0,500	0,491	0,483	0,475	0,467	0,467
S30	Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung	Indeks kampung membangun	indeks	41,89	43,43	45,02	46,67	48,38	50,16	52,00	52
		Cakupan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	persen		30	34,46	39,59	45,47	52,23	60,00	60
S31	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar OAP	persen		60,00	62,40	64,90	67,49	70,19	73,00	73,00
S32	Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan	Rata-rata Lama Sekolah wilayah perbatasan	tahun	7,48	8,09	8,75	9,47	10,25	11,09	12,00	12
		Angka Harapan Hidup wilayah perbatasan	tahun	65,08	65,56	66,04	66,53	67,01	67,50	68,00	68
		Pengeluaran Per Kapita wilayah perbatasan	Rp juta per kapita	9,49	10,12	10,80	11,52	12,30	13,12	14,00	14

No	MISI/TUJUAN/SASARAN	Indikator Tujuan		Kondisi Kinerja Awal Perencanaan		Target Kinerja					Kondisi Akhir Perencanaan
		Deskripsi	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
S33	Meningkatnya pemberdayaan terhadap KAT dan bantuan sosial PMKS	Cakupan warga KAT yang meningkat kesejahteraannya (diberdayakan)	KAT per tahun	-	-	50	50	50	50	50	250
		Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial	ribu orang per tahun	-	-	10	20	30	40	50	150
S34	Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Kategori		Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah
S35	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	indeks	492	423	364	313	269	232	200	200
		Indeks Pemberdayaan Gender	indeks	79,38	79,48	79,59	79,69	79,79	79,90	80,00	80

DAFTAR ISI

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V.1
5.1. VISI JANGKA PANJANG PAPUA	V.1
5.2. VISI PEMBANGUNAN PERIODE 2018-2023.....	V.3
5.3. MISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018-2023	V.6
5.3 TUJUAN DAN SASARAN	V.13
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1. Indikator Makro Pembangunan Tahun 2013-2018	V.13
Tabel 5.2. Matriks Keselarasan Misi, Tujuan Sasaran Serta Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Papua Tahun 2018-2023	V.18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1. Agenda/Tema Pembangunan Jangka Panjang..... V.2

